

**PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin Solok*



Disusun oleh:

SANTRI RAMIATUANISA
NPM : 171000462201053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021**

**PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017-2020**

SANTRI RAMIATU ANISA

171000462201053

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan keuangan yang di peroleh dari <http://sumbar.bps.go.id>. analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi *r-square* dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $13.895 > 1,6657$, dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar $13.251 > 1,6657$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. (3) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar $180.883 > 2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$.

Kata kunci: **Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung**

Abstract

This study aims to determine the Effect of Realization of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, on Direct Expenditures for the Regency/City of West Sumatra Province in 2017-2020. The sample used was 19 districts/cities in West Sumatra Province in 2017-2020. The sampling technique used was total sampling. The type of data used is secondary data in the form of financial reports obtained from <http://sumbar.bps.go.id>. The analysis used includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, r-square coefficient of determination and hypothesis testing. The results of this study indicate that (1) Regional Original Income partially affects Direct Expenditures. This is evidenced by the tcount value of $13,895 > 1,6657$, and a significance of $0,000 < 0,05$. (2) The General Allocation Fund partially affects Direct Expenditures. This is evidenced by the tcount value of $13,251 > 1,6657$ and the significance value of $0,000 < 0,05$. (3) Regional Original Income, General Allocation Funds simultaneously affect Direct Expenditures. This is evidenced by the Fcount of $180,883 > 2,34$ with a significant value of $0,00 < 0,05$

Keywords: The Effect of Realized Regional Original Income, General Allocation Funds on Direct Expenditure

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi secara legal formal masing-masing telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah serta pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah (Syariah et al., 2019)

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004). Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran

khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor public karena peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang asli, dan DAU. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di provinsi Sumatra barat masih belum meratanya pelayanan yang di berikan oleh kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi

Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)..Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diatas diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum.

Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.Ketimpangan fiskal dalam hal ini daerah tidak mampu mencukupkan belanja dan biaya daerah melalui sumber pendanaan asli daerah secara murni. Fenomena dari penelitian ini untuk melihat seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja langsung di Propinsi Sumatra barat yang belum dapat memberikan pemerataan bagi kebutuhan masyarakat di daerah kabupaten/kota di propinsi tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk ;meneliti dengan judul

“pengaruh reali sasinpendapatan asli daerah, dana alokasi umum, terhadap belanja langsung daerah (provinsi Sumatra barat, studi khusus)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan urutan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Apakah realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Apakah realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota Sumatra barat.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatra barat.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatra barat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bisa di manfaatkan, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya:

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan kabupaten/ kota di provinsi Sumatra barat.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan lagi judul penelitian ini dan sebagai sumber ilmu pengetahuan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu untuk lebih mengetahui bagaimana salah satu kinerja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatra barat.

Sistematis Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka di perlukansuatu sistematika penulisan sbg berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas teori yang disajikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan metode analisis data.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap belanja langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji t dengan nilai thitung sebesar $7,447 < 1,6657$, dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$.maka semakin tinggi pendapatan daerah maka belanja langsung akan tetap lancar.
2. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh secara parsial dengan belanja langsung, dengan membuktikan nilai uji t dengan nilai thitung sebesar $6,889 < 1,6657$, dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$. Maka pengaruh antara dana alokasi umum dengan belanja langsung memiliki hubungan yang signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sumber – sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD, memperhatikan alokasi belanja yang dikeluarkan, meningkatkan kinerja dalam

pelayanan publik. Dan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan infrastruktur yang ada, sehingga ini akan memacu meningkatnya pendapatan asli daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan indikator untuk melihat seberapa pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Langsung , menggunakan data laporan keuangan lima tahun terakhir, serta memperluas lokasi penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indah rahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.

(2014).

Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI

DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA

MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI

PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indah

rahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I.

(n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI*

UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi

Sulawesi Utara). 1, 233–245.

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance*

Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation.
2(2), 90–96.

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah.* XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.
(2014).

Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma, 4(2), 190–205.*

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indah rahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I.

(n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus*. *Hanisya Ursilla Lubis*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.

(2014).

(Jumiati & Indriani, 2019)Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindah rahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.

(2014).

Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indah rahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital*

Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation.
2(2), 90–96.

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah.* XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.
(2014).

(HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG²,
n.d.)Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindah rahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I.

(n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus*. Hanisya Ursilla Lubis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.

(2014).

(Adyatma & Oktaviani, 2015) Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015).

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN

EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indah rahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN¹, DAVID PAUL ELIA SAERANG², V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*. 2(2), 90–96.

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan) Pengaruh Pendapatan*

Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.

(2014).

